



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LOTHARIA LATIF**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **71170**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.759.250.000**

1. Tanah Seluas 717 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 107.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/175 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 637.250.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/169 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.031.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.927.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 775.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, LAND ROVER JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOBIL, NISSAN MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INOVA/MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000



5. MOBIL, TOYOTA AVANZA/MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000

6. MOBIL, LAND ROVER JEEP Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 300.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.650.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.484.250.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.484.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.